Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi

Syahrur Romi; Etik Umiyati

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi E-mail korespondensi: syahrurromi2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: 1) economic growth rate, minimum wage of Jambi Province and the development of poverty in Jambi City; 2) the influence of economic growth and provincial minimum wage for poverty in Jambi City. The data used is secondary data, during the period 2001 - 2015. Data analysis tool using multiple linear regression methods in semilog form. Based on the analysis obtained results: 1) The average economic growth of Jambi during the period of 2001-2015 is 6.28 percent, the minimum wage growth of Jambi Province is 14.30 percent and the poor population growth in Jambi is 17.84 percent; 2) simultaneously economic growth and minimum wage of provinces have a significant effect on poverty in Jambi City, whereas partially significant variable to poverty is provincial minimum wage.

Keywords: Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Poverty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi di Kota Jambi; 2) perkembangan kemiskinan di Kota Jambi; 3) pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode Tahun 2001 - 2015. Alat analisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda dalam bentuk semilog. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa: 1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 6,28 persen, pertumbuhan upah minimum Provinsi Jambi sebesar 14,30 persen dan pertumbuhan penduduk miskin sebesar 17,84 persen; 2) secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah upah minimum provinsi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi

suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan, sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalahmasalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Jambi sejak tahun 2010–2015 sebesar 7,15 %. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 6,66 persen, tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 6,97 persen, tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi menjadi 7,05 persen. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi meningkat menjadi 8,50 persen dan tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi melambat lagi menjadi 8,17 persen dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi melambat menjadi 5,56 persen (BPS, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam perekonomian daerah Kota Jambi tersebut menjadi sangat berarti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat bila laju pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menciptakan terjadinya *trickle down effeck* (efek penetesan kebawah) melalui penciptaan dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya diharapkan akan diikuti oleh semakin banyak penduduk yang memperoleh pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Jambi pada tahun 2010 adalah 52.500 orang, tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi menjadi 50.800 orang mengalami penurunan sebesar 3,24 persen. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi menjadi 54.300 orang mengalami peningkatan sebesar 6,89 persen, tahun 2013 menjadi 50.100 orang mengalami penurunan sebesar 7,73 persen, tahun 2014 jumlah penduduk Kota Jambi meningkat lagi menjadi 1,60 persen menjadi 50.900 orang, dan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi meningkat lagi sebesar 8,95 persen menjadi 55.510 orang. Rata-rata jumlah penduduk miskin Kota Jambi tahun 2010 sampai tahun 2015 meningkat sebesar 1,65 persen (BPS, 2016).

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis: 1) laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum Provinsi Jambi dan kemiskinan di Kota Jambi; 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMP terhadap kemiskinan di Kota Jambi.

METODE

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (times series) selama 15 tahun dari tahun 2001-2015, mencakup pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, upah minimum Provinsi Jambi dan jumlah penduduk miskin Kota Jambi. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMP terhadap kemiskinan digunakan alat analisis regresi linier berganda dalam bentuk semilog sebagai berikut:

 $Log Y1 = _{0} + _{1}PE + _{2}Log UMP + e$

Dimana:

Y1 = Penduduk miskin

PE = Pertumbuhan ekonomi

UMP = Upah Minimum Provinsi

₀ = Konstanta

1.2 = Koefisien regresi

 $_0$ = Konstanta

_{1,2} = Koefeisien regresi

e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi periode tahun 2001-2015 rata-rata meningkat sebesar 6,28 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode analisis cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari tabel 1. dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan Kota Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,50 persen, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang cukup tinggi dari sektor bangunan yaitu sebesar 27,58 persen, sektor jasa-jasa meningkat sebesar 4,10 persen dan sektor pertanian meningkat sebesar 4,34, persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 3,68 persen, hal ini ini disebabkan oleh adanya sektor pertambangan & penggalian mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,91 persen sedangkan pada tahun sebelumnya sektor ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 26,12 persen.

Tabel 1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ADHK 2000 periode 2001-2015

T-1	PDRB	Perkembangan	
Tahun	(Juta Rupiah)	(%)	
2001	2,074,956.77	-	
2002	2,151,398.98	3.68	
2003	2,255,715.04	4.85	
2004	2,372,072.34	5.16	
2005	2,506,910.32	5.68	
2006	2,655,444.97	5.93	
2007	2,845,549.62	7.16	
2008	3,020,126.51	6.14	
2009	3,215,391.40	6.47	
2010	3,429,619.05	6.66	
2011	3,668,601.41	6.97	
2012	3,927,352.94	7.05	
2013	4,261,177.94	8.50	
2014	4,609,316.18	8.17	
2015	4,865,594.16	5.56	
	Rata-rata	6,28	

Sumber: Data diolah, 2017

Upah minimum provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi selama periode 2001-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi periode 2001-2015

T-1	UMP	Perkembangan	
Tahun	(Rupiah)	(%)	
2001	245,000	-	
2002	304,000	24.08	
2003	390,000	28.29	
2004	425,000	8.97	
2005	485,000	14.12	
2006	563,000	16.08	
2007	658,000	16.87	
2008	724,000	10.03	
2009	800,000	10.50	
2010	900,000	12.50	
2011	1,028,000	14.22	
2012	1,142,500	11.14	
2013	1,300,000	13.79	
2014	1,502,300	15.56	
2015	1,710,000	13.83	
	Rata-rata	14.30	

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat bahwa tahun 2003 upah minimum provinsi Jambi mengalami peningkatan tertinggi selama periode analisis yaitu sebesar 28,29 persen. Sedangkan peningkatan upah minimum provinsi Jambi yang terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 8,97 persen.

Jumlah penduduk miskin

Rata-rata jumlah penduduk miskin di Kota Jambi selama periode 2001-2015 menurun sebesar 3,6 % per tahun. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambiselama periode analisis cenderung meningkat tetapi peningkatannya berfluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi Tahun 2001-2015

Tahun	Penduduk Miskin	Perkembangan	
ranun	(Jiwa)	(%)	
2001	11,085	-	
2002	23,000	107.49	
2003	27,600	20.00	
2004	27,200	-1.45	
2005	24,900	-8.46	
2006	22,900	-8.03	
2007	23,200	1.31	
2008	54,900	136.64	
2009	50,700	-7.65	
2010	52,600	3.75	
2011	54,600	3.80	
2012	54,300	-0.55	
2013	50,090	-7.75	
2014	50,950	1.72	
2015	55,510	8.95	
	Rata-rata	17,84	

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa tahun 2008 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 136,64 persen (ini merupakan peningkatan yang tertinggi selama periode analisis), hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di Kota Jambi semakin memburuk. Dan tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mengalami penurunan yang tertinggi yaitu sebesar 8,03 persen.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Kota Jambi

Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil estimasi diberikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil perhitungan model regresi semilog

Independent Variable	Regresión Coefisien	Standar Eror	t	Sig
Constant	360	.871	413	.687
PE	039	.035	-1.109	.289
Log UMP	.881	.175	5.037	.000
F-hitung	= 20.699			
Sig. F-hitung R ²	= .000			
R^2	= 0.775			
C 1 D . 1: 1 1 2017				

Sumber: Data diolah, 2017

Dari hasil perhitungan didapat nilai F_{hitung} sebesar 20,699 (Sig=.000). Ini berarti secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi selama periode 2001-2015. Hal ini sesuai

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dari hasil analisis diperoleh besarnya koefisien determinasi adalah 0,775. Nilai 0,775, artinya secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi mampu menjelaskan kemiskinan sebesar 77,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 22,5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi) secara parsial (individu) terhadap variabel dependent (kemiskinan). Dari hasil penelitian diperoleh:

Pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) didapat nilai t_{hitung} sebesar -1,109 dengan Sig.=.289 yang lebih besar dari = 0,1. Artinya secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi.

Pada variabel upah minimum provinsi (UMP) didapat nilai t-hitung sebesar 5,037 dengan Sig.=.000, yang lebih kecil dari = 0,01. Artinya secara parsial upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 6,28 persen, dan rata-rata perkembangan UMP Jambi periode 2001-2015 sebesar 14,30 persen. Rata-rata perkembangan penduduk miskin di Kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 17,84 persen.

Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan UMP berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi Jambi, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah UMP..

Saran

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi seyogyanya ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi problematika kemiskinan ini antara lain dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan landasan investasi baik asing maupun domestik. Dalam kaitannya dengan investasi sebagai salah satu prasyarat pendorong pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian potensi ekonomi lokal perlu diperkuat mengingat situasi ekonomi global yang tak menentu. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan akan investasi asing yang belum tentu akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja baru. Di sisi lain, investasi dan belanja pemerintah perlu lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur terutama di pedesaan untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Keberpihakan kepada rakyat perlu dipertegas dengan mengurangi rigiditas pendistribusian anggaran dan efisiensi anggaran untuk lebih ditujukan kepada proyek yang mampu memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Amri. (2007). Perekonomian Indonesia (dalam perspektif makro). Biografika: Bogor.

Bahrun,B; Syaparuddin,S; Hardiani,H. (2014). Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah; 2(1): 1-8.

Dornbusch, R., Fischer, S.,& Startz, R.(2008). *Makroekonomi*. Media Global Edukasi: Jakarta.

- Harlik,H.; Amri,A.;Hardiani,H.(2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. 1(2), 109-120
- Khabhibi, Achmad. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. USM: Surakarta.
- Mankiw, Gregory N. (2006). Pengantar ekonomi makro. Salemba Empat: Jakarta.
- Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2(3), 119-128
- Ryan,Okta,P.Y.(2013).Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011. Skripsi. FE-UNS.
- Riani, E.; Haryadi, H; Amril, A. 2014. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol 2(1); 21-28.
- Rintuh, C. M.(2003). Kelembagaan dan ekonomi rakyat. Dikti: Jakarta.
- Siregar,H dan D.Wahyuniarti.(2007). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. MB-IPB: Bogor.
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Teori dan kebijakan publik ekonomi sumber daya manusia*. Graha Ilmu: Yogyarata.
- Sumodiningrat, G.dkk. (1999). Kemiskinan: teori, fakta dan kebijakan. IMPAC: Jakarta.
- Suryadiningrat,B.(2003). Persepsi dan tindakan tokoh masyarakat desa terhadap kemiskinan. IPB: Bogor.
- Susetyo, B. (2010). Statistika untuk analisis data penelitian. Refika Aditama: Bandung.
- Tambunan, T. (2001). Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tan,S.(2010). Perencanaan Pembangunan (Teori Dan Implementasi Pada Pembangunan Daerah). UNJA: Jambi.
- Tan,S.(2013). Perencanaan Pembangunan (Teori Dan Implementasi Pada Pembangunan Daerah). UNJA: Jambi.
- Todaro dan Smith.(2010). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Umiyati, E., Amril, A., Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 1(1).
- Widarjono, Agus. (2009). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya. Ekonisia: Yogyakarta.
- Wongdesmiwati.(2009).Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, diakses melalui : http://wongdesmiwati.wordpress.com/2009/10/24/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri.
- World Bank. (2004). Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin. The World Bank: Jakarta.